

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang peran anggota legislatif perempuan dalam merespon kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pangandaran pada periode 2019-2024. Polemik keterwakilan perempuan di parlemen masih menjadi perbincangan yang hangat dan tidak ada habisnya. Pemerintah semakin gencar untuk melibatkan perempuan dalam dunia politik. Adanya ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam undang-undang pemilu 2019 membuat partai dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif harus memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat terjun ke ranah politik untuk menjadi calon legislatif perempuan yang diusulkan oleh partai.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana peran dari anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di Kabupaten Pangandaran periode 2019-2024. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data memakai teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan sebuah kesimpulan. Dengan menggunakan teori fungsi legislatif, serta didukung oleh teori peran dan teori gender dan politik sebagai pisau analisis.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam berperan sebagai anggota legislatif perempuan, anggota legislatif perempuan sudah melaksanakan tiga fungsi legislatif untuk merespon kepentingan perempuan yakni; fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tetapi sayangnya pelaksanaan itu masih kurang maksimal. Dalam fungsi legislasi kurang maksimal karena minimnya inisiasi perda terkait kepentingan perempuan. Kemudian dalam fungsi pengawasan kurang maksimal karena hanya berfokus pada kegiatan-kegiatannya semata dan tidak mengimplementasikan Pasal 153 UU Nomor 23 Tahun 2014. Di dalam fungsi anggaran kurang maksimal karena anggaran untuk program-program pemberdayaan perempuan masih kurang. Banyaknya stereotip negatif dan kurangnya jalinan emosional antara anggota legislatif dan masyarakat menjadi hambatan besar yang mempengaruhi kinerja dari DPRD Kabupaten Pangandaran, contoh: kurangnya aspirasi yang didapat oleh anggota legislatif yang kemudian akan berpengaruh kepada perundang-undangan sebagai outputnya.

Kata kunci: Keterwakilan perempuan, anggota legislatif perempuan, fungsi legislatif

ABSTRACT

This study aims to research the role of female legislators in responding to violence against women in Pangandaran Regency in the 2019-2024 period. The polemic of women's representation in parliament is still a hot and endless discussion. The government is increasingly aggressive in involving women in the world of politics. The existence of a provision of 30 percent female representation in the 2019 election law makes parties in carrying out the recruitment of legislative candidates must provide opportunities for women to be able to enter the political realm to become female legislative candidates proposed by the party.

The problem studied in this study is about the role of female legislators in responding to women's interests in Pangandaran Regency for the 2019-2024 period. The approach used is qualitative. The methods used in data collection are interview, documentation, and observation methods. The validity of the data was tested using the triangulation technique. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model data analysis technique which includes four steps, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing a conclusion. By using the theory of legislative function, and supported by role theory and gender and politics theory as an analytical knife.

The results of this study are that in their role as female legislative members, female legislative members have carried out three legislative functions to respond to women's interests, namely; legislation function, budget function, and supervisory function. But unfortunately the implementation is still not optimal. The function of legislation is less than optimal due to the lack of initiation of local regulations related to women's interests. Then in the supervisory function, it is not optimal because it only focuses on its activities and does not implement Article 153 of Law Number 23 of 2014. In the budget function, it is not optimal because the budget for women's empowerment programs is still lacking. The number of negative streotis and the lack of emotional ties between legislative members and the community are major obstacles that affect the performance of the Pangandaran Regency DPRD, for example: the lack of aspirations obtained by legislative members which will then affect the legislation as its output.

Keywords: *Women's representation, female legislative members, legislative functions*